

BAB IV

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dan saran yang dapat peneliti berikan terkait perihal *Collaborative Governance* yang terjadi pada proyek strategis nasional yang dibahas.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam Proyek Strategis Nasional Sodedan Ciliwung, dapat disimpulkan bahwa bentuk kolaborasi yang diterapkan belum sepenuhnya berjalan secara setara. Berdasarkan analisis menggunakan teori Collaborative Governance dengan lima indikator utama—keterlibatan stakeholder, komunikasi dan dialog, keputusan bersama, transparansi, serta evaluasi dan tindak lanjut—terdapat beberapa aspek yang belum berjalan optimal, terutama dalam transparansi dan partisipasi masyarakat.

Proyek Sodedan Ciliwung secara formal telah melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kontraktor sebagai aktor utama, namun partisipasi masyarakat masih sangat minim. Meskipun proyek ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta, masyarakat terdampak sering kali kurang mendapatkan akses informasi yang jelas terkait dampak proyek, proses pembebasan lahan, serta skema kompensasi yang diberikan. Keterbatasan transparansi dalam penyebaran informasi ini telah menyebabkan resistensi di kalangan warga terdampak.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih belum sepenuhnya efektif. Pemerintah daerah memiliki peran sebagai jembatan antara

pusat dan masyarakat, namun perbedaan prioritas kebijakan serta kendala birokrasi sering kali menghambat kelancaran proyek.

Hal ini terlihat dari proses pembebasan lahan yang mengalami berbagai penundaan, baik karena masalah administratif maupun adanya perlawanan dari warga. Dengan demikian, kolaborasi proyek Sodedan Ciliwung tidak berjalan dan juga tidak setara serta bersifat *top-down*, di mana keputusan utama lebih banyak ditentukan oleh pemerintah pusat, dengan keterlibatan masyarakat yang masih terbatas dan pasif. Oleh karena itu, agar proyek-proyek serupa dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang, perlu adanya peningkatan dalam aspek transparansi, partisipasi aktif masyarakat, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam Proyek Strategis Nasional Sodedan Ciliwung, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama dan keberlanjutan proyek serupa di masa depan:

1. Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi Antar Pemangku Kepentingan:
Diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih sistematis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Koordinasi lintas sektor yang lebih kuat dapat membantu mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan.
2. Mempercepat Proses Pembebasan Lahan dan Sosialisasi ke Masyarakat:
Pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah

pembebasan lahan yang sering menjadi kendala utama proyek infrastruktur. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang lebih masif melalui FGD, diskusi publik dan forum konsultasi agar masyarakat terdampak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan

3. Memperkuat Penerapan *Collaborative Governance*: Implementasi tata kelola kolaboratif (*Collaborative Governance*) harus terus diperbaiki dengan melibatkan semua pihak secara aktif dalam setiap tahap proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga diperlukan agar seluruh pihak memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap proyek.
4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proyek Infrastruktur: Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu mengedepankan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Dengan melibatkan masyarakat sejak awal, terutama dalam aspek pengawasan dan pemeliharaan proyek, maka manfaat jangka panjang dari proyek ini dapat lebih maksimal dan keberlanjutannya lebih terjaga.
5. Melakukan Evaluasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Secara Berkala: Setelah proyek selesai, perlu dilakukan pemeliharaan dan evaluasi berkala untuk memastikan infrastruktur tetap berfungsi optimal dalam mengatasi banjir. Selain itu, perlu ada transparansi dalam penyampaian hasil evaluasi kepada masyarakat.
6. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pendukung: Regulasi yang lebih jelas dan tegas perlu diterapkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara

pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, kebijakan yang mendukung inovasi dalam pengelolaan banjir dan infrastruktur berkelanjutan harus terus dikembangkan.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proyek strategis nasional dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.